



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 86 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABALONG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong yaitu :

- a. UPTD Instalasi Farmasi, dengan kelas A;

- b. UPTD Puskesmas yaitu :
1. Puskesmas Jaro;
 2. Puskesmas Wirang;
 3. Puskesmas Ribang;
 4. Puskesmas Muara Uya;
 5. Puskesmas Murung Pudak;
 6. Puskesmas Hikun;
 7. Puskesmas Tanjung;
 8. Puskesmas Tanta;
 9. Puskesmas Muara Harus;
 10. Puskesmas Kelua;
 11. Puskesmas Mungkur Agung;
 12. Puskesmas Pugaan;
 13. Puskesmas Banua Lawas;
 14. Puskesmas Haruai;
 15. Puskesmas Upau;
 16. Puskesmas Bintang Ara;
 17. Puskesmas Mabu'un; dan
 18. Puskesmas Panaan;

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Instalasi Farmasi, dan UPTD Puskesmas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang Urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD Instalasi Farmasi, dan UPTD Puskesmas merupakan satuan organisasi yang merupakan unit bagian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

UPTD Instalasi Farmasi, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang dibidang pengelolaan perbekalan, dan pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan perbekalan, dan pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan;
- c. Pelaksanaan administrasi dibidang pengelolaan perbekalan, dan pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Instalasi Farmasi terdiri atas :
 - a. kepala;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Instalasi Farmasi, dan UPTD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha pada UPTD Instalasi Farmasi merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

- (3) Kepala UPTD Puskesmas merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan dengan diberikan tugas tambahan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD Instalasi Farmasi melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Instalasi Farmasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD Instalasi Farmasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Instalasi Farmasi, dan UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi UPT Puskesmas yang dibentuk sebagai UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini tetap mengikuti struktur UPT Puskesmas yang telah ada saat ini sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi UPTD Instalasi Farmasi diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

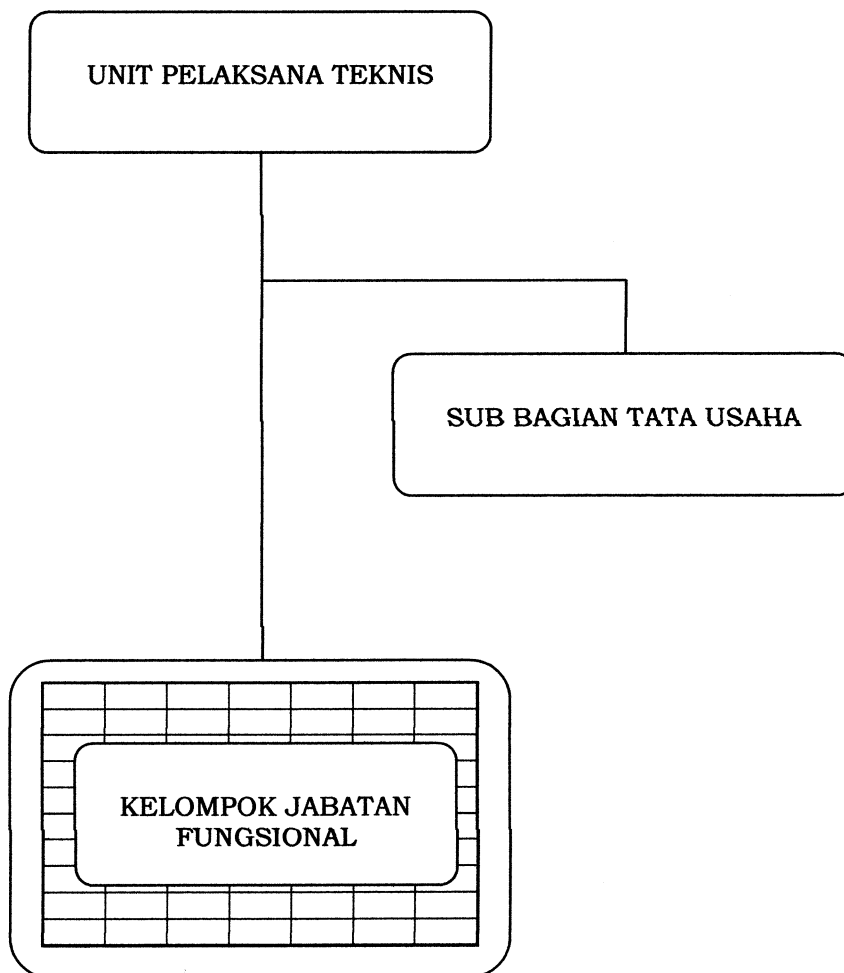


H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 86

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TABALONG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
INSTALASI FARMASI



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI